

BAB IV

INTERFAITH DIALOGUE SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANGUN CITRA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA.

Salah satu elemen dari *national power* menurut Morgenthau adalah kualitas diplomasi. Kekuatan diplomasi suatu negara akan menentukan posisi strategis negara tersebut di percaturan politik internasional, apalagi di tengah tren multilateralisme seperti dekade terakhir ini. Diplomasi menjadi *the first line of defense* bagi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer yang kuat tetapi memiliki sumber daya melimpah.³⁴

Kekuatan diplomasi inilah yang sekarang tengah dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak menjabat Presiden RI pada tahun 2004. Salah satu kebijakan pemerintah SBY adalah mengintegrasikan diplomasi publik sebagai bentuk propaganda ke dunia internasional. Menteri Luar Negeri Hassan Wirayudha menjelaskan bahwa diplomasi publik erat kaitannya dengan penjelasan posisi Indonesia di negara-negara jiran sehingga akan tercipta hubungan kerja sama yang baik dan terhindarnya kesalahpahaman tentang situasi domestik di Indonesia.³⁵

³⁴ Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, N.Y: Alfred A. Knopf, New York, 1956, second edition, revised.

³⁵ *Menlu RI: Diplomasi Publik Tanpa Harus Berbohong*, Antara, 10 Februari 2008. Lihat situs Kantor Berita Antara. <http://www.antara.co.id/arc/2008/2/10/menlu-ri-diplomasi-publik-tanpa->

Dalam konteks agenda *interfaith dialogues*, Keterlibatan aktif Indonesia akan memberi beberapa manfaat penting bagi posisi Indonesia di mata publik internasional.

A. Pemulihan Citra Indonesia di Dunia Internasional.

1. Pemulihan Citra Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, keberadaan Indonesia di berbagai forum multilateral akan memberi banyak dampak terhadap kondisi politik dan ekonomi domestik. Keaktifan Indonesia sebagai “jangkar” multilateralisme di negara dunia ketiga akan memberi citra positif sehingga kerjasama bilateral dan multilateral akan mudah terealisasi.

Agenda *interfaith dialogue*, jika kita analisis lebih dalam, memiliki implikasi positif terhadap posisi Indonesia di mata publik internasional. Yaitu, munculnya *soft power* Indonesia dalam diplomasi. Presiden SBY sejak awal telah meletakkan komitmen untuk melakukan kerjasama strategis dengan negara-negara lain dengan menghindari konflik. Politik luar negeri RI telah *disetting* dengan *good neighbour policy* dengan membangun jaringan relasi yang apik, juga dengan inovasi untuk mencapai kepentingan nasional.³⁶

³⁶ Diolah. Dina Petti. *Harus Binal Sami Memimpin 4 la SBY*. P&W Publishing, Jakarta, 2008

Patut diakui, prestasi resolusi konflik Aceh melalui MoU di Helsinki dan agenda *interfaith dialogue* yang dipelopori Indonesia telah melahirkan sebuah *political capital* baru. Indonesia menjadi sebuah negara yang disegani bukan karena kekuatan militernya yang *show of force*, tetapi lebih karena kemampuannya dalam membangun demokrasi, resolusi konflik etnis, serta toleransi antarumat beragama.

Soft power ini dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dengan *soft power*, Indonesia sebenarnya dapat lebih memperjuangkan kepentingan nasional di Dewan Keamanan PBB. Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan vital bagi terciptanya perdamaian dunia di tengah iklim unipolaritas dunia. Maka, *interfaith dialogue* harus benar-benar dioptimalkan sebagai sarana untuk meraih kepentingan nasional Indonesia dan mendapatkan *soft power* yang positif bagi negara lain.

Dan juga membaiknya citra Indonesia di mata publik internasional. Setelah sempat mengalami deklinasi di akhir dekade 1990-an, diplomasi Indonesia dapat kembali bangkit di dunia dengan berbagai agenda diplomasi. Indonesia dapat memanfaatkan *political capital* yang dimiliki sebagai *soft power*: negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, salah satu negara demokratis di dunia ketiga, dan negara yang cukup sukses dalam

beberapa resolusi konflik internal di dalam negeri secara damai seperti di Ambon, Poso, dan Aceh.

Adanya *interfaith dialogue* efektif mencitrakan Indonesia sebagai negara yang toleran, inklusif, dan moderat tanpa harus menghilangkan predikat sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia telah menjadi sebuah sampel demokrasi terbesar di dunia ketiga sekaligus mematahkan hipotesis bahwa negara berpenduduk mayoritas muslim adalah negara yang otoriter dan tidak demokratis.

Kredit positif juga didapatkan oleh Indonesia dalam forum-forum multilateral yang dihadiri oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diundangnya KH. Hasyim Muzadi untuk mempresentasikan ICIS di sidang PBB. Posisi KH. Hasyim Muzadi ini sangat strategis, karena memiliki makna bahwa kapasitas diplomasi publik Indonesia telah diakui dalam skala PBB. Padahal, pada tahun 2002, beberapa tahun sebelumnya Indonesia mendapat sorotan luas terkait kasus pengeboman di beberapa tempat yang membawa banyak korban jiwa. Ini adalah sebuah *progress* yang cukup signifikan.

Upaya pemulihan citra bangsa Indonesia melalui jalan diplomasi tentunya bukan suatu proses yang berlangsung cepat sehingga dapat langsung terlihat hasilnya. Jalan diplomasi adalah

suatu proses kebijakan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat menikmati hasilnya. Namun bukan berarti diplomasi publik melalui *Interfaith Dialogue* ini tidak menghasilkan sesuatu. Setidaknya telah dikeluarkan sejumlah kebijakan dan kerjasama antara negara-negara peserta dialog yang kini sebagian besar dari kerjasama tersebut telah dan sedang dilakukan.

Kerjasama yang terjalin sebagai tindak lanjut dari agenda *Interfaith Dialogue*, yang meliputi bidang pendidikan, budaya, media, dan dalam bidang sosial keagamaan kini mulai berjalan. Pertukaran pelajar dan mahasiswa serta tenaga ahli lainnya baik dalam bidang pendidikan, agama, sosial budaya serta media saat ini telah membawa pada hubungan multilateral yang cukup baik. Perlahan nama Indonesia mulai diperhitungkan sebagai bangsa yang plural dan demokratis.

2. Perbaikan Hubungan Indonesia-Australia.

Dialog antarkepercayaan juga memiliki implikasi yang cukup positif bagi perbaikan hubungan antara Indonesia dengan Australia. Dialog antarkepercayaan cukup efektif dalam meyakinkan opini publik di negara tersebut bahwa Indonesia adalah negara yang inklusif toleran dan kondusif untuk wisata

Jika kita analisis, pola kemitraan Australia dengan Indonesia cukup mengalami peningkatan dengan adanya agenda diplomasi publik, khususnya *interfaith dialogue*. Hubungan Indonesia-Australia sejak dulu selalu mengalami pasang-surut, dan sangat bergantung pada siapa yang memerintah serta model kebijakan apa yang ada. Hubungan Indonesia-Australia di era Megawati sempat tegang karena kasus bom Bali yang menewaskan banyak warga Australia. Ketegangan tersebut berdampak pada tersendatnya hubungan kedua negara.

Namun, agenda *Dialogue on Interfaith Cooperation* yang digagas oleh PP Muhammadiyah dan dilaksanakan atas kerjasama antara Indonesia dan Australia dapat memecahkan kebuntuan tersebut. Setidaknya, walaupun ada kecenderungan kedua pemerintah untuk tidak bersepakat dalam penanganan terorisme, ada upaya untuk rekonsiliasi dalam bentuk sebuah dialog yang dibangun secara lintas budaya. Hal serupa kembali dilakukan pada tahun 2005 dengan agenda *interfaith dialogue "Islam in Pluralistic Society"* di Melbourne.³⁷

Pasca terorisme di Indonesia, kerjasama antara Indonesia dan Australia mulai terjalin efektif tahun 2007 yaitu dengan mengadakan kunjungan dua arah antara Menteri dari masing-masing negara. Dimana kunjungan-kunjungan tersebut menyetujui

³⁷ Perwita, Anak Agung Banyu, *Hubungan Indonesia-Australia*, Kompas edisi 13 Juni 2008

berbagai kerjasama bilateral kedua negara tersebut, diantaranya dibidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan juga militer. Australia dan Indonesia bekerjasama dalam cara-cara praktis tentang berbagai isu internasional, termasuk kontra-terorisme, illegal fishing, penyelundupan manusia, flu burung, perubahan iklim dan dialog antaragama.

Dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Australia memiliki hubungan perdagangan yang sehat dengan perdagangan dua arah (barang dan jasa) yang bernilai investasi sebesar A\$ 11300000000 pada tahun 2009, dan investasi dua arah yang bernilai sekitar A\$ 4,5 miliar pada 2008. Selain itu, Australia berkomitmen untuk kemitraan pembangunan jangka panjang dengan Indonesia. Pada 2010-2011, bantuan Australia ke Indonesia diperkirakan akan bernilai A\$ 458.700.000, menjadikan Indonesia sebagai penerima bantuan terbesar dari Australia.³⁸

Selain di bidang ekonomi, di bidang pendidikan tercatat sekitar 13.990 pelajar Indonesia terdaftar untuk belajar di Australia pada tahun 2010, yang mana itu memberikan pemasukan sekitar A\$ 500 juta per tahun bagi Australia. Untuk Indonesia sendiri, pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri dan Perdagangannya Stephen Smith melakukan kunjungan ke

³⁸ "Indonesia Brief". Ddiakses tanggal 13 Juli 2011.

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.dfat.gov.au/geoi>

Indonesia pada tanggal 14-15 juli 2010. Dia bertemu Menteri Luar Negeri Dr. Marty Natalegawa dan Menteri Perdagangan Dr. Mari Pangestu, serta anggota senior KADIN, Kamar Dagang Indonesia dan Industri. Bersama dengan Dr Natalegawa, Smith membuka sekolah 2000 yang dibangun di Indonesia dengan bantuan Australia. Smith, dengan Dr. Natalegawa dan ketua Manajemen Badan Bencana Nasional di Indonesia, Dr Syamsul Maarif, juga membuka Fasilitas Australia-Indonesia untuk Pengurangan Bencana. Fasilitas ini merupakan kemitraan yang praktis untuk memperkuat kemampuan Indonesia untuk mempersiapkan dan merespon bencana alam. Selain itu pada bulan Juli 2009, Smith mengunjungi Indonesia setelah pemboman hotel di Jakarta. Dan, setelah gempa bumi di Sumatera Barat pada 30 September dan 1 Oktober, Smith mengunjungi Jakarta dan Padang dan menyerahkan dana sebesar A\$ 12 juta untuk membantu upaya dan pemulihan, termasuk A\$ 10 juta untuk membantu membangun kembali sekolah dan fasilitas kesehatan masyarakat. Pasca kebakaran hutan Victoria Februari 2009, Indonesia mengirimkan tim polisi forensik untuk membantu mengidentifikasi korban kebakaran, dan menyumbang US\$ 1 juta (A\$ 1,1 juta) untuk rekonstruksi sekolah.³⁹

Pada tanggal 9-11 Maret 2010, Presiden Yudhoyono berkunjung ke Australia. Selama kuniungannya, Presiden mendarat

kesempatan untuk berpidato di depan parlemen, dalam pidatonya Presiden mengatakan bahwa Australia dan Indonesia adalah 'mitra strategis' dan menyoroti empat tantangan bagi hubungan bilateral yang 'kokoh dan kuat': meningkatkan persepsi publik satu sama lain; mengelola hubungan yang semakin kompleks; bergerak ke arah yang lebih *opportunity-driven relationship*, dan isu-isu baru seperti terorisme, penyelundupan manusia, bencana alam, penyakit menular, krisis keuangan dan perubahan iklim. Selain itu juga telah diumumkan beberapa pernyataan kerjasama yaitu: Kerangka implementasi baru untuk kerjasama memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan manusia ditandatangani, sebagai seorang bilateral yang baru pengaturan tentang Pemberitahuan dan Bantuan Konsuler. Juga disepakati bahwa Pemerintah akan mendukung pembentukan sebuah Dialog Kepemimpinan Australia-Indonesia untuk menyatukan bisnis, akademisi dan tokoh masyarakat lainnya dari kedua negara.⁴⁰

Pada 2008-2009, Pemerintah Australia berhasil melaksanakan program diplomasi budaya di Indonesia - IN2OZ. Program ini menyoroti kreativitas sains kelas dunia Australia dan industri teknologi dan sektor pendidikan, dan juga menunjukkan keragaman Australia, kedinamisan dan toleransi. Selain itu pada Juni 2008 Australia dan Indonesia merilis sebuah pernyataan

bersama tentang perubahan iklim, yang menegaskan bahwa Australia dan Indonesia bertekad untuk merespon perubahan dan tantangan iklim yang serius dan memanggil semua pemimpin untuk menyetujui persetujuan jangka-panjang untuk pengurangan emisi sebagaimana diatur dalam *Bali Action Plan*.⁴¹

3. Peranserta Indonesia dalam Perbaikan Hubungan Islam-Barat.

Hubungan antara Islam dan Barat pasca-perang dingin telah diwarnai berbagai fenomena. Hubungan antara dua entitas budaya ini mengalami ketegangan setelah perang teluk II dan sampai sekarang masih belum dapat terjembatani secara maksimal. Islam dan Barat sulit untuk dipersatukan dalam sebuah tata dunia yang adil, karena dua entitas budaya ini memiliki perbedaan yang cukup tajam dalam beberapa persoalan.

Adalah Francis Fukuyama dan Samuel Huntington membuat sebuah teori tentang adanya perselisihan antara Barat dan peradaban lain pasca-perang dingin. Fukuyama dengan teori "*end of history*", sementara Huntington dengan teori "*clash of civilization*". Fukuyama mengklaim bahwa pasca-perang dingin, takkan ada lagi perdebatan mengenai ideologi yang akan memberi kesejahteraan. Hanya ada satu pihak yang "mengakhiri sejarah dunia", yaitu ideologi liberalisme-demokrasi.

Fukuyama menulis, *"But the century that began full of self-confidence in the ultimate triumph of western liberal democracy seems at its close to be returning full circle to where it started: not to an "end of ideology" or a convergence between capitalism and socialism, as earlier predicted, but to an unabashed victory of economic and political liberalism"*⁴².
(Fukuyama, 1989)

Adapun tesis Huntington menjelaskan bahwa akan ada beberapa ideologi pasca-komunis yang akan menjadi kompetitor utama bagi Barat, salah satunya Islam. Ideologi tersebut akan berpotensi menjadi sebuah benturan peradaban jika tidak diwaspadai. Tesis Huntington ini adalah sebuah teori baru yang ditelurkan pasca-era Sovyet dan cukup populer di kalangan Islam maupun Barat.⁴³

Dua tesis tersebut pada dasarnya senada: Barat dengan ideologi liberalisme-demokrasi akan menjadi kekuatan utama di dunia dan kekuatan lain hanya akan menjadi sebuah penghalang bagi tegaknya hegemoni Barat. Hal inilah yang menyebabkan hubungan Islam dan Barat selama ini kurang begitu baik dan diwarnai oleh pasang-surut. Untuk itu, perlu adanya sebuah agenda untuk menjembatani hubungan kedua entitas budaya tersebut. Islam dan Barat perlu melakukan dialog agar kesalahpahaman dapat dikurangi dan kerjasama strategis dapat dibangun.

⁴²Fukuyama, Francis, *"The End of History?" National Interest*, Summer 1989. Diakses melalui <http://www.wesjones.com/eoh.htm>.

⁴³Huntington, Samuel, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order*, Simon & Schuster, New York, 1997.

Peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan ini tak bisa dikesampingkan begitu saja. Tercatat, pada tahun 2005, pemerintah menyelenggarakan kegiatan Bali (*Asia-Europe Meeting*) *Interfaith Dialogue* di Bali, 21-22 Juli 2005. Agenda ini, sebagaimana disebutkan oleh SBY pada ASEM 2008 di Helsinki, memang didesain untuk mempertemukan Asia dan Eropa dalam sebuah forum dialog. KTT ASEM di Bali tahun 2005 diformat dengan agenda dialog antarkepercayaan, karena isu ini cukup krusial dalam mengurangi kesalahpahaman Barat terhadap Islam dan sebaliknya.⁴⁴

Upaya Indonesia dalam mempertemukan Islam dan Barat juga terlihat dari dua agenda berikutnya: *Dialogue "Islam in Pluralistic Society* di Vatikan, 30 September 2005 dan *The Indonesia-Netherlands Interfaith Dialogue "Peaceful Coexistence and Interfaith Cooperation"* di Den Haag, Februari-Maret 2006. Kegiatan tersebut cukup menarik karena dilaksanakan di pusat aktivitas keagamaan umat Kristiani, yaitu Vatikan. Pelaksanaan ini cukup memberi dampak bagi hubungan Islam-Barat.

Sayangnya, keberhasilan mempertemukan Eropa dan Asia (dalam hal ini juga entitas Islam) tidak dibarengi oleh keberhasilan mempertemukan entitas lain dari Barat, yaitu Amerika Serikat.

⁴⁴ *Bidato Presiden: Jadikan ASEM Dialog Multilateralisme*, Kompas, 11 September 2006

Sampai sekarang, arogansi Amerika Serikat masih menjadi penghalang rekonsiliasi dan dialog dengan umat Islam.

Memang, hegemoni Amerika Serikat pascaperang dingin telah menghasilkan perang dengan Irak dan Afghanistan, dua negara Islam. Amerika Serikat telah menjadi kekuatan hegemon yang pada gilirannya menghasilkan kekuatan unipolar di dunia.⁴⁵ Amerika Serikat melakukan serangkaian serangan, membunuh banyak rakyat sipil, dan menjatuhkan rejim yang ada di dua negara tersebut. Hal tersebut semakin menegaskan hegemoni Amerika Serikat yang akhirnya memperlebar kesenjangan hubungan Islam-Barat.

Faktor *Global Campaign of War on Terrorism* yang banyak diarahkan kepada kelompok-kelompok Islam juga menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan hubungan Islam dan Barat. Di samping itu, sikap kontradiktif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan selalu memveto resolusi atas Israel juga membuat citra Amerika Serikat menjadi negative di negara-negara Islam. Padahal Israel kerap kali melakukan serangan ke wilayah territorial Palestina (seperti pada tanggal 27 Desember 2008) dan telah menjadi *common enemy* umat Islam.⁴⁶

⁴⁵ Setiawati, Siti Mutiah, et. al. *Irak di Bawah Kekuasaan Amerika: Dampaknya bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia*. PPMFT HI FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2004.

⁴⁶ Sibbudi Riza. *Indonesia-Timur Tengah: Masalah dan Prospek*. Gema Insani Press, Jakarta

Dalam hal ini, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat menjadi sebuah alat untuk menghubungkan kedua entitas ini. Indonesia tak boleh terkooptasi oleh kepentingan Amerika Serikat atau Barat, tetapi tetap mengusahakan perdamaian dengan jalan-jalan yang moderat. *Interfaith Dialogue* dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan untuk merajut kembali hubungan yang retak tersebut.

Di Barat sendiri, sekarang ini disemua kampus yang besar memiliki Pusat Islamic Studies, jadi kalau mereka belum memiliki Islamic Studies maka kampus itu dikatakan belum lengkap, baik itu Harvard dan dimana saja. Ini artinya bahwa peristiwa 11 September 2001 itu telah menimbulkan satu agenda baru yang diluar dugaan, dimana dialog-dialog antar agama, kebudayaan dan peradaban berkembang dimana-mana.

B. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* sebagai media promosi Indonesia terhadap dunia Internasional merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dunia Internasional terhadap situasi keamanan di Indonesia. Dimana dengan tumbuhnya kepercayaan terhadap situasi keamanan di Indonesia akan berdampak baik bagi kehidupan investasi dalam negeri. Sebagaimana kita

ketahui bahwa pasca tragedi pemboman di Bali, banyak investor asing yang mengurungkan niatnya untuk menanam modal di Indonesia.

Walaupun hasil dari upaya pemulihan perekonomian nasional tidak bisa dinikmati secara langsung, tetapi setidaknya pemulihan citra Indonesia merupakan langkah awal untuk mendapatkan kepercayaan dunia Internasional terhadap keamanan di Indonesia, sehingga untuk kedepannya akan berdampak bagi kembalinya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kehidupan pariwisata Indonesia, khususnya Bali, kembali ramai.

Beberapa contoh membaiknya perekonomian nasional bisa kita lihat dengan membaiknya hubungan Indonesia-Australia. Dimana saat ini berbagai bentuk bantuan dan kerjasama banyak dilakukan. Perdagangan dan perniagaan antara Indonesia dan Australia smakin tumbuh. Dengan adanya perdagangan dua arah senilai 10,3 miliar dollar AS selama tahun 2007-2008, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-4 Australia di ASEAN dan mitra dagang terbesar ke-13 dari seluruh mitra dagang Australia. Investasi Australia di Indonesia berkembang pesat dan mencapai 3,4 miliar dollar AS pada akhir 2007.

Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia.

Selain dengan Australia, terjadi juga realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp. 23,75 triliun atau tumbuh 29,85 % dibanding periode yang sama tahun 2005 sebesar Rp. 18,29 triliun. Untuk negara investor terbesar yang masuk ke Indonesia selama Januari-Maret 2006 terbanyak adalah Jepang yang mencapai nilai sebesar 538,8 juta dollar AS dengan 25 proyek, Mauritius sebesar 377,1 juta dollar AS dengan satu proyek, dan Korea Selatan sebesar 265,5 juta dollar AS dengan 48 proyek.⁴⁷

Selain itu, dari tabel di bawah ini juga dapat kita lihat peningkatan perekonomian, khususnya Bali, di bidang pariwisata mulai meningkat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Subjek Tabel: Data wisman
Series: tahunan
Rentang Waktu: 2001 - 2010

Tahun	Data
2001	1356774
2002	1285842
2003	995272
2004	1460420
2005	1388984
2006	1262537
2007	1668531
2008	2085084
2009	2385122
2010	2576142

⁴⁷ *Investasi Kuartal Pertama 2006 Tumbuh 41,39 Persen*, sumber: Kompas Cyber Media-
www.kompas.com.

Selain pada sektor ekonomi, kerjasama yang terjalin sebagai tindak lanjut dari *Interfaith Dialogue* juga meliputi bidang pendidikan, budaya, media, dan dalam bidang sosial keagamaan kini mulai berjalan. Kerjasama tersebut diantaranya:

1. Kerjasama dibidang Teknologi Informasi antara negara-negara Asia Tenggara dengan Uni Eropa. Dengan kerangka kerjasama ini, Direktorat Jendral Komisi Uni Eropa Bidang Masyarakat dan Media Informasi menyelenggarakan forum bersama yaitu *the 2006 Euro-South East Asia Forum on Information & Communication Technology (ITC)* dari tanggal 19-23 Juni 2006 di Singapura.
2. Program Darmasiswa bagi negara-negara sahabat yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) kepada mahasiswa warga negara asing dari negara-negara sahabat untuk belajar bahasa Indonesia dan seni budaya Indonesia selama 1 tahun. Program Darmasiswa tahun akademik 2005/2006 diikuti 133 peserta dari 254 pelamar dari berbagai negara sahabat. Sebanyak 13 peserta diantaranya yakni peserta Darmasiswa Plus nantinya diberikan kesempatan membantu peningkatan kemahiran bahasa asing di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini diakui sebagai sarana diplomasi kebudayaan yang efektif melalui "*people to people contact*" Para alumni yang telah

mengenyam pendidikan 1 tahun di Indonesia telah menunjukkan keaktifan yang perlu diapresiasi dalam menyebarkan informasi tentang Indonesia.⁴⁸

Pertukaran pelajar dan mahasiswa serta tenaga ahli lainnya baik dalam bidang pendidikan, agama, sosial budaya serta media saat ini telah membawa pada hubungan multilateral yang cukup baik. Perlahan nama Indonesia mulai diperhitungkan sebagai bangsa yang plural dan demokratis. Dan sekarang kebijakan yang merugikan perekonomian Indonesia, seperti *travel warning* dan *travel ban* telah dicabut.

Kerjasama di atas adalah sebagian contoh kecil dari kerjasama-kerjasama yang telah terjalin antara negara-negara mayoritas muslim, khususnya Indonesia dengan negara-negara Barat setelah berbagai upaya diplomasi yang dilakukan sehubungan dengan kasus terorisme internasional.

Negara-negara Barat kini menyadari bahwa para pelaku teror yang kebetulan beragama Islam tersebut tidak lantas mempengaruhi citra umat Islam secara keseluruhan. Terorisme semacam musuh bersama bagi dunia internasional, sehingga perundang-undangan tentang terorisme kini telah diterapkan disetiap negara sebagai perwujudan dari upaya memerangi terorisme dan hal ini tidak lagi menjadi hambatan bagi negara-negara Barat

⁴⁸ *Indonesia Berikan Beasiswa Program Darmasiswa bagi Negara Sahabat, Republika-10*